

DAFTAR PUSTAKA

- Ainullah, A. (2017). Penerapan Teori Kemanfaatan Hukum (Utilitarianisme) Dalam Kebijakan Pembatasan Usia Pernikahan. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 3(1), 86–97.
- Dwiputrianti, S. (2009). Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 6(3), 01-01. <https://doi.org/10.31113/jia.v6i3.364>
- Hambali, et.al. (2021). Politik Hukum Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum terhadap Pemidanaan Pelaku Korupsi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(9). 200-220. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.511>
- Hastuti, Intan Respatining. (2017). Benefit Cost Analysis Tindakan Korupsi (Studi Kasus: Lapas Kedung Pane, Jawa Tengah). Undergraduate thesis, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro. <http://eprints.undip.ac.id/53468/>
- Hiariej, E. O. S. (2015). Prinsip-prinsip hukum pidana: Edisi penyesuaian KUHP Nasional. Raja Grafindo Persada.
- Hikmawati, P. (2017). Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif (Criminal Conditional Supervision As a Substitute of Probation Sentence Towards Restorative Justice). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 7(1), 71-88. <https://doi.org/10.22212/jnh.v7i1.923>.
- Indonesia Corruption Watch. (2022). Pasal Korupsi dalam KUHP: Menjauhkan Efek Jera dan Menguntungkan Koruptor. Retrieved from *antikorupsi.org*: <https://antikorupsi.org/id/pasal-korupsi-dalam-kuhp-menjauhkan-efek-jera-dan-menguntungkan-koruptor>.
- Indonesia Corruption Watch. (2023). *Korupsi Lintas Trias Politika*. Indonesia Corruption Watch. [https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi Laporan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun%202022.pdf).
- Indonesia Corruption Watch. (2024). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2023*.
- Irwansyah. (2020). Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel. Mirra Buana Media: Yogyakarta.
- Ishaq, I. (2017). Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi. Alfabeta.
- Jacob, P., & et al. (2024). Hakikat Pengetahuan Dan Kebenaran. Filsafat Ilmu, CV. Gita ang.
- Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal). s: Semarang.
- ini 2021. Wamenkumham Sebut RUU KUHP Sebagai Upaya Susun Sistem Rekodifikasi. Diakses pada 17 Februari 2024, dari



- <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/14/12073301/wamenkumham-sebut-ruu-kuhp-sebagai-upaya-pemerintah-susun-sistem?page=all>.
- Monika, Andrzej. (2021). *Argumenty I Rozumowania Prawnicze W Konstytucyjnym Państwie Prawa Komentars*, (Kraków: 2021) h. 740-750. <https://doi.org/10.12797/9788381383370>.
- Mudzakkir. (2010). Kebijakan Kodifikasi (Total) Hukum Pidana Melalui RUU KUHP dan Antisipasi Terhadap Problem Perumusan Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana di Masa Datang. Makalah disampaikan pada lokakarya Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Perkembangan Hukum Pidana yang diselenggarakan oleh BPHN, Semarang. Tanggal 3 s/d 5 November 2010 .
- Prasetyo, Yogi. (2017). Legal truth (Menakar kebenaran hukum). *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 1: 89-111. hlm. 19. <http://dx.doi.org/10.24269/ls.v1i1.588>
- Putro, W. D. (2020). Menemukan Kebenaran Hukum Dalam Era Post-Truth. *Metajuridika. Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst Putusan Pengadilan TinggiNo. 55/Pid/TPK/2014/PT.DKI*
- Ramadhan, A., & Erdianto, K. (2020). Catatan ICW, Kasus Korupsi Dana Desa Terbanyak Muncul pada 2019.
- Suyatmiko, W. H. (2021). Memaknai turunnya skor indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2020. *Integritas:Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 161-178. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.717>.
- Tempo.co, 11 Agustus 2023. Menkumham Jelaskan Soal Pasal Pidana Kumpul Kebo Dalam KUHP Baru, Begini Bunyinya. Diakses pada 17 Februari 2024, dari <https://www.tempo.co/politik/menkumham-jelaskan-soal-pasal-pidana-kumpul-kebo-dalam-kuhp-baru-begini-bunyinya-156911>.
- Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index*. Transparency International. <https://www.transparency.org/en/cpi/2023/index/idn>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (2001).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (1999).
- Zulfiani, A., Probahudono, A. N., & Sangka, K. B. (2023). Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dalam Upaya Menurunkan Angka Korupsi pada Sektor Swasta. *UNES Law Review*, 5(4), 4303-4324. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.741>

